

**INVENTARIS ARSIP
KABINET PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
(20 SEPTEMBER 1949 – 6 SEPTEMBER 1950)**



**Oleh:
Eni Yuliasuti
360 000 390**

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
1998**

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN.....	i
DAFTAR PUSTAKA.....	viii

I. UMUM

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
--	----------

II. KHUSUS

A. ADMINISTRASI DAN ORGANISASI

1. Kepegawaian	3
2. Ketatausahaan	4
3. Kerumahtanggaan.....	4
4. Protokoler.....	5

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pertahanan dan Keamanan	7
2. Luar Negeri	12
3. Dalam Negeri	13
4. Keuangan	17
5. Kemakmuran.....	19
6. Kehakiman	21
7. Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum	23
8. Kesehatan	25
9. Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	25
10. Sosial	27
11. Perburuhan	28
12. Agama.....	29
13. Penerangan.....	30

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN
INDEKS NAMA

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG SEJARAH

Usaha Belanda untuk mendapatkan Kembali bekas daerah jajahannya terus dilakukan, baik secara terang-terangan maupun dengan cara membonceng tentara sekutu yang datang ke Indonesia guna melucuti senjata tentara Jepang. Akhirnya, Belanda berhasil menduduki beberapa kota besar dan mendirikan pemerintahan terhadap daerah yang didudukinya. Usaha Belanda tersebut mendapat perlawanan keras dari rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Menghadapi perlawananitu, Belanda menyadari tidak mungkin lagi mendirikan pemerintahan seperti zaman Hindia Belanda dahulu. Maka, diusahakan suatu jalan yaitu dengan kekerasan senjata dan politik yang dikenal dengan politik *divide et impera*, yang bertujuan untuk memecah belah persatuan bangsa. Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan dimusnahkan atau paling tidak akan dijadikan negara bagian saja. Belanda ingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Untuk maksud tersebut maka didirikanlah Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948) dan Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948) dan Negara Madura (1949). Disamping itu Belanda juga mengadakan penyerangan - penyerangan yang terkenal dengan Agresi I (1947) dan Agresi II (1948), sehingga seluruh kota di Indonesia diduduki termasuk Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Namun rakyat Indonesia tidak tinggal diam, semangat untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkorbar, meskipun hanya dengan persenjataan yang sangat sederhana.

Melihat keadaan tersebut akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda, maka diadakanlah sebuah perundingan yang kemudian dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar. Para peserta konferensi ini ialah Belanda, Republik Indonesia, *Byeenkomst voor Federal Overleg* atau BFO (gabungan dari negara-negara yang didirikan oleh Belanda) dan sebuah komisi dari PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 2 November 1949 tercaailah persetujuan Konferensi Meja Bundar dengan hasil pokoknya adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat

pada akhir bulan September 1949, sedangkan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun kemudian dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Pada tanggal 18 November 1949 Kabinet Republik Indonesia menerima dengan baik persetujuan Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya diadakan pemilihan Presiden dan pembentukan Kabinet Republik Indonesia Serikat, yang kemudian terpilihlah Soekarno sebagai Presiden dengan Perdana menterinya Drs. Moh. Hatta. Penyerahan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 dan sejak saat itu berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai undang-undang dasarnya. Konstitusi ini direncanakan oleh delegasi dari Republik Indonesia dengan delegasi dari BFO. Istilah penyerahan kedaulatan di sini diartikan sebagai pemulihan atau pengembalian kedaulatan. Dengan berdirinya Negara Indonesia serikat beserta Konstitusinya berarti bahwa pada saat itu Negara Republik Indonesia hanya berkedudukan sebagai negara bagian, sedangkan Undang-undang Dasar 1945 hanya berlaku sebagai Undang-undang Dasar Negara bagian Republik Indonesia yang meliputi Sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukotanya Yogyakarta.

Beberapa hal yang pokok tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut:

A. Bentuk Negara

1. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat terdiri atas:
 - a. Negara Republik Indonesia dengan daerah status quo seperti tercantum dalam persetujuan Renville:
 - b. Negara Indonesia Timur.
 - c. Negara Pasundan termasuk distrik federal Jakarta:
 - d. Negara Jawa Timur;
 - e. Negara Sumatra Timur dengan pengertian bahwa status quo Asahan Seltan dan labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatra Timur.
 - f. Satuan kenegaraan yang tegak berdiri yakni Jawa Tengah, Bangka, Belitung, riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah selebihnya bukan daerah bagian.

B. Presiden

- a. Presiden adalah kepala negara yang dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah bagian.
- b. Syarat untuk dipilih menjadi Presiden ialah telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut hak pilihnya. Jika Presiden berhalangan beliau, dapat memerintahkan Perdana Menteri untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.
- c. Presiden dan Perdana Menteri merupakan pemerintah. Dalam menjalankan roda pemerintahan negara, Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah ada ditangan Menteri baik secara Bersama-sama maupun untuk masing-masing bagiannya. Sistem cabinet yang menganut pertanggungjawaban Menteri disebut dengan sistem kabinet parlementer.

C. Sistem Perwakilan

1. Republik Indonesia Serikat menganut sistem perwakilan bilateral (dua kamar) yaitu
 - a. Senat atau perwakilan daerah-daerah yaitu setiap daerah mempunyai 2 anggota dalam senat yang berhak mengeluarkan satu suara dalam senat;
 - b. Penunjukan anggota senat dilakukan oleh Pemerintah daerah bagian, dari daftar yang diajukan oleh masing-masing perwakilan rakyat memuat tiga calon untuk tiap-tiap kursi. Prosedur penunjukan anggota senat tersebut ditetapkan sendiri oleh bagian;
 - c. Persyaratan untuk menjadi anggota sama dengan pencalonan Presiden.
2. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia yang terdiri 150 anggota, terbagi atas 50 anggota dari negara bagian republik Indonesia dan 100 anggota dari daerah serta selebihnya ditentukan pembagiannya atas dasar perundingan bersama.

Tugas Senat Bersama-sama dengan pemerintah dan DPR adalah:

- a. merubah konstitusi Republik Indonesia Serikat:
- b. menetapkan undang-undang federal yang menyangkut beberapa daerah bagian atau bagian-bagiannya;

- c. menetapkan anggaran belanja Republik Indonesia Serikat yang ditetapkan dengan undang-undang federal:

Wewenang utama DPR adalah dalam bidang pembuatan undang-undang. Salah satu pasal konstitusi ini disebutkan bahwa dalam tempo 1 tahun sesudahnya berlakunya konstitusi tersebut maka di seluruh Indonesia pemerintah akan mengadakan pemilihan yang bebas dan rahasia untuk menyusun DPR yang dipilih secara umum.

D. Sifat Konstitusi Republik Indonesia Serikat

1. Konstitusi RIS bersifat sementara, hal ini dapat dilihat dalam ketentuannya yang mengatakan bahwa konstituante Bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi RIS.
2. Anggota Konstituante terdiri dari anggota DPR, Senat dan anggota luar biasa yang dipilih atau ditunjuk ataupun diangkat oleh rapat gabungan senat dan DPR.

Sejak diplokanirkan kemerdekaannya rakyat Indonesia menghendaki suatu negara kesatuan yang melindungi dan meliputi segenap rakyat Indonesia. Bentuk negara federal tetap dipandang sebagai usaha Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa dan tidak sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Oleh karena itu setelah pengakuan kedaulatan, timbul dimana-mana tuntutan untuk Kembali dalam bentuk susunan negara kesatuan. Pergolakan dan pernyataan spontan dari rakyat Indonesia untuk menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia terjadi dimana-mana. Menurut ketentuan yang diatur dalam Konstitusi RIS tentang penggabungan diri kepada suatu daerah bagian lain sesungguhnya dapat dilaksanakan, hanya pelaksanaannya harus diatur dalam undang-undang federal. Oleh karena terjadi pergolakan-pergolakan yang makin lam makin hebat, maka pemerintah RIS mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950, Lembaran Negara No. 16 tanggal 8 Maret 1950 tentang cara perubahan susunan kenegaraan wilayah RIS.

Akhirnya daerah atau negara bagian satu per satu menggabungkan diri kepada negara RI, dan tinggal Negara Indonesia Timur serta Negara Sumatra yang belum bergabung. Dalam perkembangan selanjutnya diadakanlah permusyawaratan antara Negara RI dan pemerintah RIS yang bertindak pula sebagai wakil dari negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. Dalam permusyawaratan itutelah diambil

keputusan yaitu Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan RI (negara bagian) yang ditanda tangani pada tanggal 19 Mei 1950. Pokok persetujuan yang telah diputuskan ialah bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai penjelmaan Negara RI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk keperluan itu akan diberlakukan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI sedemikian rupa sehingga esensi dari pasal 27, 29, dan 33 UUD 1945 ditambah bagian -bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk didalamnya.

Pada tanggal 20 Juli 1950 pemerintah RIS dan pemerintah RI menyetujui rancangan UUDS RI yang telah disusun, untuk selanjutnya diteruskan kepada senat dan DPR oleh pemerintah RIS dan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat oleh pemerintah RI untuk disahkan.

Dengan Undang-undang Federal Nomor 7 tahun 1950 ditetapkanlah perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus. Dengan demikian tamatlah Riwayat negara Republik Indonesia Serikat dan kembalilah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

II. PENATAAN ARSIP

Arsip Republik Indonesia Serikat ini diserahkan ke Arsip nasional Republik Indonesia pada tahun 1973 bersamaan dengan arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia yang jumlahnya 4 meter lari dengan kurun waktu 1949-1950.

Secara fisik keadaan arsip ini dalam kondisi yang cukup baik. Pada tahap awalnya pembuatan inventaris arsip Republik Indonesia Serikat ini dilakukan oleh saudara Bambang Barlian staf Pengolahan dan Inventarisasi Arsip, meskipun pada akhirnya karena sesuatu hal maka penyelesaiannya dilakukan oleh Eni Yuliasuti Arsiparis pada pengolahan Arsip Konvensional.

Penyusunan inventaris arsip Republik Indonesia Serikat di usahakan berdasarkan tugas dan fungsi, meskipun tidak lengkap.

Bab I. UMUM

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab II. KHUSUS

A. ADMINISTRASI DAN ORGANISASI

1. Kepegawaian
2. Ketatausahaan
3. Kerumahtanggaan
4. Protokoler

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pertahanan dan Keamanan
2. Luar Negeri
3. Dalam Negeri
4. Keuangan
5. Kemakmuran
6. Kehakiman
7. Perhubungan, tenaga dan Pekerjaan Umum
8. Kesehatan
9. Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan
10. Sosial
11. Perburuhan
12. Agama
13. Penerangan

DAFTAR PUSTAKA

“KEPUTUSAN Presiden Republik Indonesia Serikat”. Nomor 2. 1949.

“20 Tahun Indonesia Merdeka”. Jilid I. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1965.

“Mengenai Kabinet Republik Indonesia selama 40 Tahun Indonesia Merdeka”. Drs. Mizwar Djamily. Jakarta: Kreasi Jaya Utama, 1986.

**INVENTARIS ARSIP KABINET PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949 - 1950)**

No. Arsip	Uraian Deskripsi Arsip	Volume	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu
	I. UMUM			
	1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Presiden Republik Indonesia Serikat: Undang-undang No.11 tahun 1949 tanggal 14 Desember 1949 tentang penetapan undang-undang mengenai pengesahan konstitusi Republik Indonesia Serikat, disertai lampiran.	8 lembar	Konsep	1949/12/14
2	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 1 Tahun 1949 tanggal 18 Desember 1949 tentang penunjukan Drs. Moh. Hatta, Ide Anak Agung Gde, Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Paduka Sultan Hamid II sebagai pembentuk kabinet.	1 lembar	Konsep	1949/12/18
3	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 2 Tahun 1949 tanggal 20 Desember 1949 tentang pengangkatan perdana menteri beserta pembantunya di lingkungan Kabinet Republik Indonesia Serikat.	1 lembar	Salinan	1949/12/20
4	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 33 tanggal 21 Januari 1950 tentang pengumuman penempatan dokumen-dokumen penting pada lembaran negara agar dapat diketahui oleh setiap orang.	1 lembar	Salinan	1950/01/21
5	Menteri Perburuhan dan Sosial: Pengumuman Bersama tanggal 9 Februari 1950 tentang pemisahan 2 kementerian.	1 lembar	Asli	1950/02/09
6	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 65 tanggal 14 Februari 1950 tentang perubahan kedudukan Jawatan Sandi.	2 lembar	Salinan	1950/02/14
7	Menteri Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat-surat tanggal 14 Februari-24 Agustus 1950 tentang pengiriman keputusan presiden dan peraturan pemerintah yang sudah diumumkan dalam Berita Negara.	1 sampul	Asli	1950/02/14 - 1950/08/24
8	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 95 tahun 1950 tanggal 28 Februari 1950 tentang pembentukan Dewan Keuangan dan Perekonomian	1 lembar	Stensilan	1950/02/28
9	Surat-surat tanggal 1 Maret, 25 April, 3 Mei 1950 tentang permintaan undang-undang darurat dibicarakan dengan DPR guna mendapat persetujuan dengan lampiran	1 sampul	Konsep, Asli	1950/03/01 , 1950/04/25 , 1950/05/03
10	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan tanggal April 1950 tentang pembentukan/penetapan kementerian-kementerian RIS.	1 lembar	Konsep	1950/04
11	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat-surat keputusan tanggal 19 April , 7 Agustus 1950.	2 lembar	Konsep	1950/04/19, 1950/08/07
12	Sekretaris Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 9 Mei 1950 tentang penyampaian amandemen-amandemen atas rencana keputusan presiden mengenai lingkungan pekerjaan dan nama berbagai kementerian untuk dibicarakan dalam rapat dewan menteri, dengan lampiran.	1 lembar	Stensilan	1950/05/09
13	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 207 tanggal 8 Juli 1950 tentang perjalanan dinas Dr. G.G.G. J Van Stremis ke Australia guna penyusunan " Flora Malesiana"	1 lembar	Salinan	1950/07/08
14	Presiden Republik Indonesia Serikat: Keputusan No. 213 Tahun 1950 tanggal 25 Juli 1950 tentang keberangkatan Kepala Laboratorium Penyelidikan Laut Dr.J.D.F. Hardenberg ke Australia memenuhi undangan FAO.	1 lembar	Konsep	1950/07/25
15	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 234 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 tentang keberangkatan Otoy Pamelan Pratikno ke Inggris untuk mempelajari " Veterinary Pathology & Therapy".	1 lembar	Konsep	1950/08/15

16	Presiden Republik Indonesia Serikat; Surat Keputusan No. 235 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 tentang keberangkatan Iman Sumadi dan Hardono Hadiredjo ke Amerika untuk belajar ilmu pertanian dan kehutanan	2 lembar	Konsep	1950/08/15
17	Presiden Republik Indonesia Serikat: Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1950 tanggal 20 Januari 1950 tentang pembentukan jabatan gubernur militer ibukota, dengan lampiran.	2 lembar	Konsep	1950/01/20
18	Sekretaris Negara Republik Indonesia: Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tanggal 2 Februari 1950 tentang peraturan-peraturan pemerintah pusat.	1 lembar	Salinan	1950/02/02
19	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat-surat keputusan tanggal 7 Februari -15 Agustus 1950 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat negara Republik Indonesia Serikat.	1 sampul	Salinan	1950/02/07 - 1950/08/15
20	Menteri Kehakiman Soepomo: Undang-undang Darurat No. 20 tanggal 13 Mei 1950 tentang pemerintahan Jakarta Raya, dengan lampiran	2 lembar	Salinan	1950/05/13
21	Kepala Jawatan Luar Negeri Urusan Umum Pegawai kepada Perdana Menteri Republik Serikat: Surat tanggal 30 Mei 1950 tentang penyampaian rencana tanggal 30 Mei 1950 tentang penyampaian rencana Undang-Undang Darurat mengenai perjalanan dan istirahat ke luar negeri.	2 lembar	Konsep	1950/05/30
22	Presiden Republik Indonesia Serikat: Undang-undang No. 7 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 tentang penetapan undang-undang mengenai perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia	1 lembar	Stensilan	1950/08/15
23	Presiden Republik Indonesia Serikat: Rancangan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950 tentang penerbitan lembaran negara dan berita negara Republik Indonesia Serikat serta pemberlakuan undang-undang federal dan peraturan pemerintah.	1 lembar	Konsep	1950
	II. KHUSUS			
	A. ADMINISTRASI DAN ORGANISASI			
	1. Kepegawaian			
24	Surat-surat tanggal 8 November 1949- 22 Juni 1950 tentang pengangkatan, mutasi dan kenaikan pangkat pegawai Republik Indonesia Serikat.	1 sampul	Asli	1949/11/08- 1950/06/22
25	Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN) Republik Indonesia di Yogyakarta: Resolusi tanggal 6 Januari 1950 tentang desakan untuk segera menempatkan pejabat-pejabat Republik Indonesia pada pemerintah Republik Indonesia Serikat.	1 lembar	Asli	1950/01/06
26	Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat: Surat-surat tanggal 1,2,24 Februari, 19 Juni, 6 September 1950 tentang rencana penggabungan pegawai Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat dengan pegawai kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia Yogyakarta, dengan lampiran.	1 sampul	Pertinggal	1950/02/01 , 1950/02/02, 1950/02/24, 1950/06/19, 1950/09/06
27	Kabinet Presiden: Surat-surat tanggal 11 Maret - 11 Juli 1950 tentang pegawai Republik Indonesia Serikat yang berkebangsaan Belanda.	1 sampul	Asli	1950/03/11 - 1950/07/11
28	Surat-surat tanggal 16 Maret, 18 Nopember 1950 tentang lamaran pekerjaan di lingkungan kantor Kabinet Presiden.	1 sampul	Asli, Perteinggal	1950/03/16, 1950/11/18
29	Direktur Kabinet Presiden: Surat-surat keputusan tanggal 20 Maret, 18 April, 9 Mei 1950 tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Direktur Kabinet Presiden dan Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat, dengan lampiran.	7 lembar	Salinan	1950/03/20, 1950/04/18, 1950/05/09
30	Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat: Surat Edaran tanggal 20 Juni 1950 tentang kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai baru, disertai surat pengantar.	2 lembar	Salinan	1950/06/20

31	Direktur Kabinet Presiden: Daftar gaji untuk bulan Agustus 1950, tanggal 21 Agustus 1950.	2 lembar	Konsep	1950/08/21
32	Kabinet Presiden Republik Indonesia: Undang-undang Darurat No. 34 Tahun 1950 tanggal 10 November 1950 perubahan undang-undang darurat No. 25 Tahun 1950 mengenai hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat, dengan lampiran.	8 lembar	Stensilan	1950/11/10
2. Ketatausahaan				
33	Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan: Surat tanggal 11 Januari 1950 tentang permintaan perintah pengosongan Istana Bogor dan Cipanas dari bala tentara Belanda.	2 lembar	Pertinggal	1950/01/11
34	Perdana Menteri Negara Indonesia Timur kepada Menteri Kehakiman: Surat tanggal 15 Juni 1950 tentang legalisasi tanda tangan yang mewakili Perdana Menteri, dengan lampiran.	5 lembar	Tembusan	1950/06/15
35	Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 13 September 1950 permohonan ruangan bekas gedung Algemeene Secretarie dikembalikan kepada Kabinet Presiden guna keperluan Drs. Moh. Hatta dan Staf.	3 lembar	Pertinggal	1950/09/13
3. Kerumahtanggaan				
36	Sekretaris Presiden Republik Indonesia Serikat kepada Komisi Huisvesting: Surat tanggal 30 Desember 1949 tentang perumahan pegawai Sekretariat Presiden Residen Republik Indonesia	1 lembar	Pertinggal	1949/12/30
37	Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat-surat 21 Januari-6 Juli 1950 tentang pembelian bahan-bahan keperluan kantor.	1 sampul	Asli, Pertinggal	1950/01/21 - 1950/07/06
38	Direktur Kabinet Presiden kepada Bengkel: Surat-surat tanggal 25 Januari-1 Juli 1950 tentang perbaikan mobil.	1 sampul	Pertinggal	1950/01/25 - 1950/07/01
39	Mr. Sudjarwo kepada Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 20 Februari 1950 tentang permintaan otograf I.L. Malany.	1 lembar	Asli	1950/02/20
40	Direktur Kabinet Presiden kepada pemilik penjahit "sympathy": Surat tanggal 11 Maret 1950 tentang penolakan atas permohonannya untuk menjadi resmi istana dengan lampiran.	3 lembar	Pertinggal	1950/03/11
41	Sekretaris Presiden Republik Indonesia Serikat kepada pengurus hotel Des Indes: Surat-surat tanggal 31 Maret-20 Juli 1950 tentang pesanan kamar untuk tamu-tamu agung.	1 sampul	Pertinggal	1950/03/31 - 1950/07/20
42	Sekretaris Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Kepada Jawatan Perjalanan Negeri: Surat tanggal 8 april 1950 tentang permohonan kendaraan bermotor, dengan lampiran.	1 lembar	Tembusan	1950/04/08
43	Surat-surat tanggal 11 Mei, 2 Juni 1950 tentang penawaran barang.	2 lembar	Asli	1950/05/11 , 1950/06/23
44	Rincian tugas rumah tangga presiden/panglima tertinggi APRIS tanggal 1 Juli 1950	2 lembar	Asli	1950/07/01
45	Sekretaris Republik Indonesia dalam Masa Pembubaran kepada menteri Keuangan Republik Indonesia (dalam masa peralihan): Surat tanggal 12 Oktober 1950 tentang penyerahan barang-barang yang didapat dari bekas kantor Sekretariat delegasi Republik Indonesia. NB: tidak lengkap	1 lembar	Tembusan	1950/10/12
4. Protokoler				
46	Masyarakat: Surat-surat tanggal 7 Desember 1949 - 30 Agustus 1950 tentang permohonan bantuan untuk kelancaraan usaha dan biaya hidup, dengan lampiran.	1 sampul	Asli, Pertinggal	1949/12/07 - 1950/08/30
47	Pengurus IKORAS (Ikatan Olahraga Anak-anak Sekolah) Banjar kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 12 Desember 1949 tentang permohonan penganugerahan piala, disertai surat pengantar.	3 lembar	Asli	1949/12/12

48	Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat-surat tanggal 17 Desember 1949 - 19 Desember 1950 tentang ucapan terima kasih.	3 lembar	Pertinggal	1949/12/17 - 1950/12/19
49	Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Tata tertib penobatan presiden Republik Indonesia Serikat pertama tanggal 18 Desember 1949 dalam sidang badan pemerintah.	1 sampul	Stensilan	1949/12/18
50	R. Djedjeh Setiawirin kepada Presiden RIS: Surat tanggal 28 Desember 1949 tentang pemberitahuan akan kelahiran anaknya, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1949/12/28
51	Masyarakat: Surat-surat tanggal 31 Desember 1949- 9 Agustus 1950 tentang permohonan audiensi.	1 sampul	Asli	1950/08/09 - 1949/12/31
52	Masyarakat: Surat-surat tanggal 1 Januari-30 Agustus 1950 tentang permohonan foto keluarga Presiden Soekarno dan sambutan dalam berbagai suara.	1 sampul	Asli, Perteinggal	1950/01/01 - 1950/08/30
53	Direktur Kabinet Presiden Kepada R.M.A.A. Koesomo Oetojo: Surat tanggal 13 Januari 1950 tentang ucapan selamat hari ulang tahun ke-80, dengan lampiran.	2 lembar	Konsep	1950/01/13
54	Direktur Kabinet Presiden Mr. Brotodiningrat kepada Djohan Effendie: Suarat tanggal 18 Januari 1950 tentang pemberian nama anak yang baru lahir, dengan lampiran.	2 lembar	Konsep	1950/01/18
55	Drs. Tjoa Soe Tjong kepada Presiden: Surat tanggal 23 Januari 1950 tentang pemberitaan wafatnya Presiden Direktur Kian Graw Company Oei Tjong Hauw.	1 lembar	Asli	1950/01/23
56	Direktur Kabinet Presiden Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan: Surat tanggal 3 Maret 1950 tentang penarikan ajudan presiden Mayor Singgih untuk mendapat pendidikan militer.	1 lembar	Perteinggal	1950/03/03
57	Panitera Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 21 Maret 1950 tentang pengiriman ikhtisar pidato Presiden Republik Indonesia Serikat di Ikhtisar Pidato Presiden, Republik Indonesia Serikat di Fakultas Hukum perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/03/21
58	Rakyat kepada presiden: Surat tanggal 22 Maret 1950 tentang permohonan untuk menjadi anak angkat.	1 lembar	Asli	1950/03/22
59	Menteri agama Kepada Kabinet Presiden RIS; Surat tanggal 27 Maret 1950 tentang protes terhadap gambar/potret Bung karno dan Nehru Ketika Naik Sepeda di India. NB. Kertas rusak	1 lembar	Asli	1950/03/27
60	Surat-surat tanggal 1 April- 30 Agustus 1950 tentang kunjungan presiden ke daerah-daerah, dengan lampiran.	1 sampul	Perteinggal	1950/04/01 - 1950/08/30
61	Mr. Ratmoko kepada Hernowo: surat tanggal 5 April 1950 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadiri pernikahan, dengan lampiran.	2 lembar	Konsep	1950/04/05
62	Presiden Soekarno kepada Waworontu: Surat tanggal 17 april 1950 tentang keinginan untuk merdeka.	1 lembar	Konsep	1950/04/17
63	Direktur Kabinet Presiden Mr. Ratmoko kepada perusahaan Pantas: surat tanggal 26 april 1950 tentang permohonan untuk menjadi perusahaan yang membuat peci untuk presiden, dengan lampiran.	2 lembar	Perteinggal	1950/04/26
64	Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat-surat tanggal 27 april -24 oktober 1950 tentang saran-saran di bidang spritual.	3 lembar	Asli	1950/04/27 - 1950/10/24
65	Berkas kunjungan Perdana Menteri India ke Indonesia tanggal 10 mei - Juli 1950.	1 sampul	Asli, Salinan	1950/05/10 - 1950/07/-
66	Amin Hamzah kepada Presiden: Surat tanggal 14 Juni 1950 tentang permohonan bantuan usaha peternakan	1 lembar	Asli	1950/06/14
67	Komite Pengelola Sekolah Islam kepada kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 27 Juni 1950 tentang permohonan sumbangan.	1 lembar	Asli	1950/06/27
68	Sekretaris Presiden kepada Carl Bergithon: Surat tanggal Juli 1950 tentang undangan pertunjukan film, dengan lampiran.	2 lembar	Perteinggal	1950/07/-

69	Sekretaris Presiden Mr.S. Brotoningrat kepada G. KJ. Rtau Timur: Surat tanggal 8 Juli 1950 tentang pemberian surat ijin istimewa dari Presiden untuk mendapatkan bahan tekstil sehubungan dengan rencana perkawinan Gusti Siti Noeroel Koesoemawardani.	1 lembar	Pertinggal	1950/07/08
70	Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri: Surat tanggal 27 Juli 1950 tentang pengiriman pidato presiden tanggal 17 Agustus, dengan lampiran.	4 lembar	Pertinggal	1950/07/27
71	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama: Susunan acara upacara penyelenggaraan negara kesatuan tanggal 2 Agustus 1950, dsertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/08/02
72	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan tanggal 9,10 Agustus tentang pembentukan Panitia pusat Penyelenggara Upacara Pembentukan Negara Kesatuan dan upacara kemerdekaan.	2 lembar	Stensilan	1950/08/09 - 1950/08/10
73	Menteri Luar Negeri kepada Duta Besar RI di Washington: Surat tanggal 8 September 1950 tentang permohonan penyampaian surat ucapan terima kasih kepada John G. Breman, dengan lampiran.	2 lembar	Tembusan	1950/09/08
74	Rakyat: Surat-surat telegram tahun 1950 tentang ucapan selamat atas pengangkatan para menteri RIS.	1 sampul		1905/05/03
B. TUGAS DAN FUNGSI				
1. Pertahanan dan Keamanan				
75	Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 27, 28 November 1949 tentang desakan untuk menentukan status negara bagian.	2 lembar	Tembusan	1949/11/27 - 1940/11/28
76	Staf Angkatan Perang Urusan Pekerjaan Istimewa Jogjakarta kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia: Surat tanggal 29 November 1949 tentang bekas tentara sekutu bangsa India/Pakistan yang masih berada di Indonesia.	1 lembar	Tembusan	1949/11/29
77	Surat-surat tanggal 10 desember 1949 - 14 Agustus 1950 tentang situasi keamanan di Sulawesi.	1 sampul	Asli	1949/12/10 - 1950/08/14
78	Naskah Komunika Bersama antara Koordinator Keamanan dalam Panitia Persiapan Nasional dengan Gubernur Jakarta dan daerah sekitarnya 12 Desember 1949.	1 lembar	Stensilan	1949/12/12
79	Presiden Republik Indonesia: Surat Keputusan No.12 tanggal 28 desember 1949 tentang pengangkatan Kolonel R. Hidayat sebagai kepala staf "Q" Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat.	1 lembar	Salinan	1949/12/28
80	Presiden Republik Indonesia Serikat: Suarat-surat Keputusan No. 7, 8 tanggal 28 Desember 1949 tentang pengangkatan Kolonel Abdul Haris Nasution dan Kolonel Udara R.S. Suryadarma masing-masing sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Udara RIS.	5 lembar	Salinan	1949/12/28
81	Komisaris Besar polisi Jakarta: Surat Perintah Harian tanggal 30 Desember 1949 tentang ajakan untuk melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya sesudah penyerahan kedaulatan, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1949/12/30
82	Rakyat: Surat tahun 1949 tentang ajaran Imam Mahdi.	1 lembar	Asli	1949
83	UNCI: surat tanggal 2 Januari 1950 tentang contoh kartu identitas anggota Badan Executive Militer UNCI.	1 lembar	Salinan	1950/01/02
84	Panitia penyelenggara konferensi seluruh nama perjuangan di Indonesia Timur dan panitia bekas tawanan politik di Makasar: Surat-surat tanggal 2, 4 Januari 1950 tentang desakan supaya mendapat pengakuan menjadi tentara resmi guna menjaga keamanan di wilayah Indonesia Timur.	2 lembar	Asli	1950/01/02, 1950/01/04
85	DPP Masyumi: Resolusi-resolusi tanggal 7 Januari , 23 April 1950 tentang penyelesaian masalah Darul Islam	2 lembar	Asli	1950/01/07, 1950/04/23

86	Menteri Kemakmuran kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat: surat tanggal 21 Januari 1950 tentang gangguan keamanan terhadap pabrik-pabrik yang ditinggalkan oleh Belanda, dengan lampiran.	1 lembar	Tembusan	1950/01/20
87	Sekretariat TNI-MK 742 kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 7 Januari 1950 tentang organisasi MK 742 yang belum diakui sebagai kesatuan TNI, dengan lampiran.	1 sampul	Asli	1950/01/27
88	Menteri Khusus Kekayaan Lepas Pantai Belanda kepada Presiden: Surat tanggal 2 Februari 1950 tentang perjanjian kekayaan lepas pantai. NB: dalam bahasa belanda	1 lembar	Asli	1950/02/02
89	Resolusi-resolusi tanggal 4 Februari-7 Agustus 1950 tentang desakan untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1 sampul	-	1950/02/04 - 1950/08/07
90	Kepala Staf Angkatan Perang kepada KSAD: Surat tanggal 11 Februari 1950 tentang permintaan untuk mengawasi gerak-gerik Mayor Jenderal Soedrajat, dengan lampiran.	5 lembar	Tembusan	1950/02/11
91	Anggota Gerakan Pemoeda Anak Negara Sumatera Timur kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 14 Februari 1950 tentang permintaan untuk mengambil tindakan kepada mereka yang hendak merobohkan Negara Sumatera Timur.	1 lembar	Asli	1950/02/14
92	Berkas Dewan Keamanan UNCI tanggal 31 Januari - 8 Februari 1950.	1 sampul	Asli	1950/01/31 - 1950/02/08
93	IPPI Jogjakarta: Resolusi tanggal 5,6 Maret 1950 tentang desakan untuk menghapus pemerintahan militer sehubungan dengan insiden antara TNI dengan TRIP di Bilitar, dengan lampiran.	3 lembar	Asli	1950/03/05 , 1950/03/06
94	Direktur Kabinet Presiden Presiden kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta: surat tanggal 16 Maret 1950 tentang hadiah mobil dan rumah kepada Ibu Soedirman atas usul Kapten Soepardjo. Dengan lampiran.	4 lembar	Pertinggal	1950/03/16
95	Pimpinan GPII: Resolusi tanggal 20 Maret 1950 tentang desakan untuk membubarkan Negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur.	1 lembar	Tembusan	1950/03/20
96	Direktur Kabinet Presiden RIS kepada sekretaris dewan menteri: Resolusi tanggal 20 Maret 1950 tentang status negara bagian.	2 lembar	Konsep	1950/03/20
97	Rakyat: Nota tanggal 21 Maret 1950 tentang kebijakan pemerintah dalam hal pembersihan terhadap anansir-anasir DI, disertai surat pengantar. NB: keadaan kertas rusak	2 lembar	Asli	1950/03/21
98	Jaksa Agung Republik Indonesia kepada PM Republik Indonesia Serikat: Laporan rahasia tanggal 25 Maret 1950 tentang kegiatan "Persatuan Komunis Asia (PERKOMA)" di Sumatra Utara, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/03/25
99	Direktur Kabinet Presiden Kepada Menteri Pertahanan: Surat tanggal 4 April 1950 tentang permintaan perhatian istimewa terhadap kematian Kapten R.C Hazlehurst yang ditembak Belanda pada bulan Juli 1947, dengan lampiran.	2 lembar	Pertinggal	1950/04/04
100	Mr. M. Besar Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat tanggal 24 April 1950 tentang tawanan politik di LP Kebon Waru Bandung, dengan lampiran.	4 lembar	Asli	1950/04/24
101	Rakyat Indramayu: Resolusi-resolusi tanggal 14 April-16 Mei 1950 tentang permintaan agar Kapten Abdul Sukur tetap memegang jabatan Kepala Staf Teritorial Kabupaten Indramayu.	1 sampul	Asli	1950/04/14 - 1950/05/16
102	letkol S.L. Aruan kepada Pati APRIS: kawat tanggal 17 April 1950 tentang permohonan membasmi pengacau di wilayah Indonesia Timur, disertai surat pengantar.	2 lembar	Salinan	1950/04/17

103	Direktur Kabinet presiden Kepada PM Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 19 April 1950 tentang berota: Aneka buletin", mengenai klaim Filipina terhadap Borneo Utara.	1 lembar	Pertinggal	1950/04/19
104	Sri Sultan Bima: Kawat tanggal 21 April 1950 tentang permohonan untuk mempercepat pendaratan tentara APRIS di Sumbawa, disertai surat pengantar.	2 lembar	Salinan	1950/04/21
105	Kaleb Mangundap Tomohon kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Kawat tanggal 24 April 1950 tentang permohonan untuk mengirim Brigade Merpati ke Sulawesi Utara untuk menjaga keamanan, disertai surat pengantar.	4 lembar	Salinan	1950/04/24
106	R.P.S. Gondhokoesoemo Wakil Kepala Jawatan Sandi: Perintah Harian kepada Letnan Dua Achadi No. 0025/DS/PH/IV/50 tanggal 28 April 1950 untuk bertugas ke Semarang dan Jogjakarta, dengan lampiran.	4 lembar	Salinan	1950/04/28
107	PSII: Resolusi tanggal 4 Mei 1950 tentang sikap terhadap bentuk negara kesatuan, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/05/04
108	Front Penentang Proklamasi Republik Maluku Selatan, Makassar kepada Pati APRIS: Kawat tanggal 5 Mei 1950 tentang permohonan untuk ikut serta dalam Angkatan Perang ke Maluku Selatan, disertai pengantar.	3 lembar	Salinan	1950/05/05
109	Persatuan Indonesia Maluku Surabaya: Resolusi tanggal 5 Mei 1950 tentang desakan pembubaran RMS, disertai surat pengantar.	2 lembar	Stensilan	1950/05/05
110	Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat tanggal 19 Mei 1950 tentang penggeledahan terhadap kapal pengangkut Amerika Serikat yang diduga membawa senjata api doane Palembang	3 lembar	Asli	19/05/1950
111	Letkol Kahar Muzakar kepada KSAD: Surat tanggal 20 Mei 1950 tentang permohonan mengundurkan diri dari dinas ketentaraan.	1 lembar	Asli	1950/05/24
112	Panitia Rapat Rahasia Maluku: Resolusi tanggal 24 Mei 1950 tentang desakan mengadakan militer di Maluku Selatan guna mengatasi kekejaman yang dilakukan oleh tentara KNIL.	1 lembar	Tembusan	1950/05/24
113	Panglima Divisi I TNI kepada KSAD: Laporan tanggal 26 Mei 1950 tentang pelaksanaan demobilisasi.	1 lembar	Tembusan	1950/05/26
114	Saliem Abdoel Wahid kepada Presiden Soekarno: Surat bulan Mei 1950 tentang keluhan keamanan di wilayah-wilayah Indonesia.	1 lembar	Asli	1950/05/-
115	Menteri Pertahanan Kepada Gubernur Jatim: Surat tanggal 6 Juni 1950 tentang perintah kepada Kol.Sungkono dan Letkol Dr. Suwondo untuk berangkat ke Jakarta menemui Presiden Republik Indonesia Serikat, dengan lampiran dan pengantar.	3 lembar	Asli	1950/06/06
116	Direktur Kabinet Presiden Kepada Menteri Pertahanan: Surat tanggal 8 Juni 1950 tentang tindakan APRIS terhadap para mubaligh Islam di Sumatra Utara. NB: tidak lengkap	1 lembar	Pertinggal	1950/06/08
117	K.K. Unithan Editor Malaysia kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 9 Juni 1950 tentang perdamaian dunia. NB: dalam bahasa Inggris	1 lembar	Tembusan	1950/06/09
118	Surat-surat tanggal 15 Juni - 21 Agustus 1950 tentang Uni Indonesia Belanda.	3 lembar	Asli, Salinan	1950/06/15 - 1950/08/21
119	Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Pertahanan: Surat tanggal 27 Juni 1950 tentang permintaan perhatian atas kesediaan 500 pemuda Minahasa untuk membantu APRIS dalam penyelesaian Maluku Selatan, dengan lampiran.	2 lembar	Pertinggal	1950/06/27
120	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan bulan Juni 1950 tentang pemberlakuan keadaan darurat perang di daerah-daerah Indonesia Timur.	1 lembar	Stensilan	1950/06/-
121	Jaksa Agung kepada presiden RIS: Laporan-laporan tanggal 4 Juli, 5 Agustus 1950 tentang kegiatan buruh PKI.	2 lembar	Tembusan	1950/07/04 , 1950/08/05

122	Jaksa Agung kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 8 Juli 1950 tentang surat kabar" Swy Tho Pao yang merupakan corong Moskow/pro komunis, dengan lampiran.	3 lembar	Asli	1950/07/08
123	Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Pertahanan: Surat tanggal 12 Juli 1950 tentang permintaan rakyat Cibarusa Jawa Barat untuk menempatkan TNI Divisi Soliwangi guna mengatasi gangguan keamanan, dengan lampiran.	4 lembar	Pertinggal	1950/07/12
124	Husein bin Muhammad Ba'abad kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 17 Juli 1950 tentang permintaan agar bertindak tegas terhadap para pengacau keamanan. NB. Dalam bahasa Arab.	1 lembar	Asli	1950/07/17
125	Presiden Republik Indonesia Serikat: surat Keputusan No. 217 tanggal 26 Juli 1950 tentang pengangkatan Letkol Kawilarang sebagai panglima tentara/teritorium Indonesia Timur.	1 lembar	Salinan	1950/07/26
126	Jaksa Agung kepada Presiden: Surat tanggal 1 Agustus 1950 tentang gerakan perdamaian dunia komunis sebagai propaganda	1 lembar	Asli	1950/08/01
127	Komite Pembela Perdamaian Dunia Kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Resolusi tanggal 6 Agustus 1950 tentang untuk mengikuti keinginan AS dalam perang Korea, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/08/06
128	Musa bin Sono kepada Menteri Agama Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 6 Agustus 1950 tentang ketidaksetujuannya terhadap Pemerintah Amerika Serikat yang meminta tiga pangkalan perang kepada Indonesia .	1 lembar	Salinan	1950/08/06
129	Serma R. Machamaddalan kepada Kastaf APRI: Surat tanggal 7 Agustus 1950 tentang permohonan untuk kembali menjadi anggota APRIS dengan pangkat yang sesuai.	1 lembar	Tembusan	1950/08/07
130	Presiden Republik Indonesia Serikat: Keputusan tanggal 14 Agustus 1950 tentang pengangkatan JOH. Padmoseputro sebagai Kepala paderi tentara.	1 lembar	Salinan	1950/08/14
131	Jawatan Penerangan NII Daerah Pekalongan: Komentar terhadap sambutan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1950 yang berjudul: bersatu kembali".	1 lembar	Asli	1950/08/17
132	Hafhudin kepada Kepala Staf Divisi I: Surat tanggal 11 September 1950 tentang keberatan atas penurunan pangkat sehubungan dengan reorganisasi dalam APRIS, dengan lampiran.	2 lembar	Tembusan	1950/11/11
133	Pemuka agama di Minahasa: Surat tanggal 30 Agustus 1950 tentang desakan untuk menyelidiki peristiwa pelemparan batu pada saat misa.	1 lembar	Tembusan	1950/08/30
134	Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Nota hasil persetujuan komisi militer, disertai surat pengantar tanggal 31 Oktober 1949. NB: dalam bahasa Belanda.	1 lembar		1949/10/31
135	Persatuan Buruh dan Tani Indonesia (Perburti): Mosi tanggal 14 Nopember 1950 desakan untuk memupus APRA dan gerakan Andi Aziz.	1 lembar	Asli	1950/11/14
136	Masyumi cabang Indramayu: Mosi tanggal 19 Nopember 1950 tentang pernyataan stuju atas larangan pengibaran bendera pada hari pemakaman Amir Syarifuddin Cs.	1 lembar	Asli	1950/11/19
137	DPP Partai Rakyat Nsional: Maklumat tanggal 10 desember 1950 tentang anjuran untuk membentuk dewan mobilisasi	1 lembar	Tindakan	1950/12/10
138	Direktur Kabinet Presiden Mr. Ratmoko kepada Sekretaris Dewan Menteri: Surat tanggal 15 Mei 1950 tentang penyampaian rencana Keputusan Presiden nomor 169 tahun 1950 mengenai pernyataan darurat perang di beberapa daerah di Indonesia Timur untuk ditanda tangani Presiden, dengan lampiran.	2 lembar	Pertinggal	1950/05/15
139	Ketua Umum Persatuan Bekas Tentara RI kepada Presiden RI: Surat tanpa tanggal tahun 1950 tentang usul untuk memperkuat negara, melindungi rakyat dan menempatkan tenaga -tenaga rasionalisasi dari tentara.	1 lembar	Asli	1950

2. Luar Negeri				
140	Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat-surat tanggal 9 Desember - 16 April 1950 tentang perundingan Indonesia-Belanda.	1 sampul	Asli, Salinan	1950/12/09 - 1950/04/16
141	Surat-surat tanggal 16 Desember 1949- 8 Desember 1950 tentang hubungan luar negeri.	1 sampul	Asli, Tembusan	1949/12/16 - 1950/12/08
142	Biro Nasional Rakyat Indonesia, Pusat Jogjakarta kepada Presiden: Tinjauan umum tanggal 28 Desember 1949 tentang hasil KMB, dengan lampiran.	5 lembar	Asli	1949/12/28
143	Perselah politik Sabang semenjak Desember 1949, 1- 28 Januari 1950, disertai surat pengantar kepada Jakasa Agung tanggal 13 April 1950. NB: dalam bahasa Belanda	2 lembar	Konsep, Tembusan	1949/12/-, 1950/01/01 - 1950/01/28, 1950/04/13
144	Presiden RIS: Surat Keputusan No. 34 tanggal 23 Januari 1950 tentang pengangkatan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Dubes luar biasa dan berkuasa penuh pada pemerintah AS.	1 lembar	Salinan	1950/01/23
145	Presiden RIS: Surat Keputusan No. 59 tanggal 7 Februari 1950 tentang pengangkatan A.K.Pringgodigdo dan Moh jahja sebagai sekretaris Jenderal dan sekretaris Uni Indonesia-Belanda.	1 lembar	Konsep	1950/02/07
146	Duta Besar Amerika di Jakarta kepada A.K. Pringgodigdo: Surat tanggal 30 April 1950 tentang surat kepada Charles Seymour sehubungan dengan pemakaman Kennedy di Bandung.	1 lembar	Asli	1950/04/30
147	Sekretaris Duta Besar RIS di Washington DC: Surat tanggal 2 Mei 1950 tentang penyampaian surat presiden kepada editor majalah life, disertai surat pengantar.	3 lembar	Asli	1950/05/02
3. Dalam Negeri				
148	Delegasi Ri: Rancangan konstitusi sementara RIS berdasarkan usul Mr. Dr. Soepomo tanggal 18 Juli 1949.	1 lembar	Copy	1949/07/10
149	Kabinet Presiden: Surat-surat tanggal 14 Desember 1949 - 16 September 1950 tentang pencalonan anggota DPR dan senat.	1 sampul	Asli	1949/12/14 - 1950/11/16
150	Kabinet Presiden: Surat-surat tanggal 27 Desember 1949- 28 Juli 1950 tentang kegiatan rapat/sidang dewan menteri.	1 sampul	Asli, Peninggal	1949/12/27 - 1950/07/28
151	Berkas Panitia Negara tetap untuk menyelesaikan masalah kedudukan kenegaraan karesidenan Irian (Nieuw Guinea) tanggal 1 Januari -1 November 1950.	1 sampul	-	1950/01/01 - 1950/11/01
152	G.J. Vermeulen kepada Delegasi RI: Surat tanggal 3 Januari 1950 tentang negara bagian di Indonesia. NB: bahasa Belanda	1 lembar	Salinan	1950/01/03
153	Gubernur Jakarta dan sekitarnya kepada Presiden RIS: Surat tanggal 4 Januari 1950 tentang perubahan peraturan pemerintah negara Batavia.	1 lembar	Asli	1950/01/04
154	Kementerian Perhubungan dan Pengairan Negara Pasundan Kepada Menteri Kehakiman Negara Pasundan: Surat tanggal 4 Januari 1950 tentang pemberitahuan mosi parlemen No. 3/M tanggal 27 September 1948.	1 lembar	Tembusan	1950/01/04
155	Surat-surat tanggal 4 Januari - 30 Maret 1950 tentang Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	1 sampul	Tembusan	1950/01/04 - 1950/03/30
156	Ormas kepada Presiden RIS: Resolusi - resolusi tanggal 4 Januari - 14 Juni 1950 tentang tuntutan untuk mengembalikan daerah-daerah di Jateng ke wilayah RI.	1 sampul	Asli	1950/01/04 - 1950/06/14
157	Konsulat Persatuan Penghulu dan Pegawai Jawa Timur kepada acting Presiden Republik Indonesia di Jogjakarta: Resolusi tanggal 7 Januari 1950 tentang tuntutan untuk membubarkan negara Jawa timur dan madura.	1 lembar	Tembusan	1950/01/07
158	Walikota Jakarta kepada Presiden RIS: Surat tanggal 11 Januari 1950 tentang permohonan Lim Toeng Hoat Cs untuk tetap dapat menggunakan tanah yang mereka diami, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/01/11
159	Surat-surat tanggal 11 Januari - Maret 1950 tentang negara bagian Pasundan.	1 sampul	Asli, Tembusan	1950/01/11 - 1950/03/17

160	Masyumi Samarinda: resolusi tanggal 13 Januari 1950 tentang desakan untuk mengadakan plebisist untuk status negara-negara bagian.	1 lembar	Asli	1950/01/13
161	Surat-surat tanggal 15 Januari- 1 Juni 1950 tentang negara Sumatera.	1 sampul	Tembusan	1950/01/15 - 1950/06/01
162	Gubernur Militer Jatim kepada RIS: Laporan tanggal 16 Januari 1950 tentang keadaan politik, militer dan ekonomi di Jatim, dengan lampiran.	1 sampul	Asli	1950/01/16
163	Berkas tanggal 16 Januari - 10 Agustus 1950 tentang propinsi Kalimantan Barat.	1 sampul	Asli, Salinan	1950/01/16 - 1950/08/10
164	Berkas tanggal 19 Januari-21 Juli 1950 tentang Sulawesi Selatan.	1 sampul	Asli, Salinan	1950/01/19 - 1950/07/21
165	Rakyat Asahan Selatan: Resolusi tanggal 21 Januari 1950 tentang permintaan jawaban atas tuntutan pengembalian daerah Asahan Selatan ke Wilayah Negara RI.	1 lembar	Asli	1950/01/21
166	Pemerintah Daerah Kalimantan: Surat-surat ketetapan tanggal 21 Januari, 10 April 1950 tentang status daerah-daerah swaparaja di Kalimantan.	2 lembar	Petikan	1950/01/21, 1950/04/10
167	Gabungan Tenaga Pembangunan Indonesia : Resolusi tanggal 22 Januari 1950 tentang tuntutan untuk menetapkan UUDS RIS menjadi UUD RIS.	1 lembar	Turunan	1950/01/22
168	Resolusi-resolusi tanggal 13, 20 April 1950 tentang tuntutan penggabungan swaparaja Bima, Sumbawa, Dompu ke dalam wilayah Republik Indonesia, dengan lampiran.	1 sampul	Asli	1950/04/1950, 1950/04/20
169	Wali Negara Madura: Surat-Surat keputusan tanggal 30 Januari, 8 Februari 1950 tentang penyerahan kekuasaan kepada rakyat di tangan DPR Madura, dengan lampiran.	3 lembar	Tembusan	1950/01/30, 1950/02/08
170	Menteri Kemakmuran: Surat pembetulan tanggal 4 Februari 1950 tentang pedoman persewaan tanah untuk pabrik gula 1950/1951.	1 lembar	Stensilan	1950/02/04
171	Organisasi Massa: Resolusi-resolusi tanggal 4 Februari 22 Juni 1950 tentang pertanian.	1 sampul	Asli	1950/02/04 - 1950/06/22
172	PNI Cabang Mangga Besar Jakarta: Resolusi tanggal 12 Februari 1950 tentang desakan untuk mengembalikan daerah jakarta ke wilayah RI.	1 lembar	Stensilan	1950/02/12
173	Kabinet Presiden: Surat-surat tanggal 14 Februari -12 Agustus 1950 tentang rencana pelantikan anggota DPR RIS.	1 sampul	Asli	1950/02/14 - 1950/08/12
174	Panitia Pengembalian Status RI Kepatihan Tangerang:Resolusi tanggal 18 Februari 1950 tentang pernyataan melepaskan diri dari distrik Federal Jakarta dan bergabung.	1 lembar	Asli	1950/02/18
175	Resolusi-Resolusi tanggal 21 Februari - 21 Juli 1950 tentang status daerah swaprja Surakarta.	1 sampul	Asli	1950/02/21 - 1950/07/21
176	Abul Moetachir Moehamad Heroeningrat kepada presiden RIS: Surat-surat tanggal 24 Februari, 21 Oktober 1950 tentang permintaan pemulihan status kerajaan Banten.	1 sampul	Asli	1950/02/24 , 1950/10/21
177	Presiden RIS: Surat Keputusan No. 101 tanggal 3 Maret 1950 tentang perubahan nama karesidenan Bangka dan Belitung menjadi Riau, Bangka dan Belitung.	1 lembar	Konsep	1950/03/03
178	Akta penyerahan dan penerimaan kekuasaan atas negara Sumsel dan proklamasi tanggal 18 Maret 1950 tentang penyerahan dan penerimaan kekuasaan pemerintahan NSS.	2 lembar	Asli	1950/03/18
179	Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Acting Ketua Prawoto mangkusamito kepada Presiden RI di Jogjakarta: Surat tanggal 23 Maret 1950 tentang perubahan RUU pemerintah mengenai penambahan dan pelaksanaan UU No. 13 tahun 1948 " <i>perubahan vorstenlandsch groundhuureglement</i> , dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/03/23
180	Serikat Buruh Indonesia Kalimantan Tenggara: Mosi tanggal 24 Maret 1950 tentang tuntutan agar Kalimantan Tenggara segera dimasukkan ke dalam rayon IV.	1 lembar	Tembusan	1950/03/24
181	Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Dewan Mentari: Surat-surat tanggal 29 Maret, 27, 29 April, 17 Mei 1950 tentang tuntutan dari beberapa negara bagian untuk bergabung ke wilayah RI, dengan lampiran.	1 sampul	Asli, Pertinggal	1950/03/29, 1950/04/27, 1950/05/17

182	Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Dewan Menteri: Surat tanggal 11 April 1950 tentang resolusi mengenai negara bagian, dengan lampiran.	1 sampul	Asli	1950/04/11
183	Pemangku jabatan Gubernur Propinsi Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil: Proklamasi tanggal 17 April 1950 dalam rangka melepaskan diri dari NIT dan bergabung kepada Pemerintah Republik Indonesia Jogjakarta.	1 lembar	Salinan	1950/04/17
184	Kbainet Presiden: Risalah-risalah rapat DPR-Senat RIS tanggal 17 April-4 September 1950.	1 sampul	Salinan	1950/04/17 - 1950/09/04
185	Letda A. Zaini kepada Presiden RIS: Surat tanggal 23 April 1950 tentang catatan partai politik di Bangka, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/04/25
186	C.A. Rebeira kepada Sekretariat Pelayanan Informasi Pemerintah SriLangka: Laporan 28 April 1950 tentang satus Borneo Utara, Pulau Sulu dan Mindanau.	1 lembar	Asli	1950/04/28
187	Surat-surat tanggal 9 Mei - 29 Juli 1950 tentang Propinsi Maluku.	1 sampul	Asli, Pertinggal	1950/04/09 - 1950/07/29
188	Presiden RIS kepada Ketua DPS: Surat tanggal 16 Mei 1950 tentang penyampaian UU Darurat No. 14 tahun 1950 mengenai penyelenggaraan tugas pemerintahan di NSS oleh RIS, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/05/16
189	Ketua Senat RIS kepada PM RIS: Surat tanggal 30 Mei 1950 tentang perubahan rancangan konstitusi sementara, dengan lampiran.	1 lembar	Tembusan	1950/05/30
190	Panitia Tetap IV: Laporan tanggal 31 Mei 1950 tentang peninjauan di Sumatera Timur dan Selatan.	1 lembar	Stensilan	1950/05/31
191	Direktur Kabinet Presiden kepada Kabinet Perdana Menteri: Surat tanggal 7 Juni 1950 tentang pemberhentian Tengku Suibun sebagai anggota kabinet.	3 lembar	Pertinggal	1950/06/07
192	Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat kepada sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman : Surat tanggal 8 juni 1950 tentang pengiriman peraturan pemerintah mengenai penghapusan pemerintahan militer di Daerah Istimewa Jogjakarta dan Enclack Kasunanan Mangkunegaran. NB: lampiran tidak ada	1 lembar	Pertinggal	1950/06/08
193	Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat: Laporan singkat panitia tetap III (keuangan, kemakmuran perhubungan, tenaga dan pekerjaan umum) tanggal 12 Juni 1950 tentang peninjauan ke beberapa tempat di Jawa.	1 lembar	Stensilan	1950/06/12
194	Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia Serikat dan republik Indonesia: Rencana konstitusi sementara Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1950.	1 lembar	Stensilan	1950/06/29
195	Panitia Permufakatan Ibu Sumatera Timur: Resolusi tanggal 1 Juli 1950 tentang desakan agar Dr. Mansur diangkat menjadi pimpinan besar di Sumatera Timur.	1 lembar	Asli	1950/07/01
196	Vice President setia usaha PMRS (Persatuan Melaju Riouw Sedjati) Singapore kepada Presiden RIS: Surat tanggal 1 Juli 1950 tentang status kerajaan Riau, disertai surat pengantar.	3 lembar	Asli	1950/07/01
197	Gerakan Pemuda Islam Indonesia cabang Bima: Resolusi tanggal 5 juli 1950 tentang tuntutan pembubaran Dewan pemerintahan Swapraja Bima.	1 lembar	Stensilan	1950/07/05
198	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat: Undang-undang No.4 tanggal 20 Juli 1950 tentang penggantian kerugian anggota DPR RIS, dengan penjelasan.	1 lembar	Stensilan	1950/07/20
199	Bupati/KDH Kabupaten Aslab (Sumatera Timur Selatan) kepada Presiden RIS: Surat tanggal 24 Juli 1950 tentang pengakuan kepada Pemerintahan Ri sebagai satu-satunya instansi resmi daerah Aslab , dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/07/24
200	Presiden RIS kepada Ketua DPR RIS: Surat tanggal 24 Juli 1950 tentang rencana undang-undang mengenai perubahan konstitusi sementara RIS menjadi Undang-undang Negara Kesatuan RI untuk dipertimbangkan dalam sidang DPR, dengan lampiran.	2 lembar	Pertinggal	1950/07/24

201	Perdana Menteri Negara Indonesia Timur kepada Mendagri Republik Indonesia Serikat: surat tanggal 31 Juli 1950 tentang liquidasi NIT.	1 lembar	Tembusan	1950/07/31
202	PERFEBI kepada RIS; Surat tanggal 31 Juli 1950 tentang permintaan ijin untuk mengedarkan film-film berita "suasana Indonesia" ke bioskop-bioskop, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/07/31
203	Dewan Jambi Sementara: Notulen rapat tanggal 8 Agustus 1950.	1 lembar	Salinan	1950/08/08
204	DPD Propinsi Aceh: Mosi tanggal 12 Agustus 1950 tentang sikap terhadap penggabungan Aceh dalam Propinsi Sumatera Utara, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/08/12
205	Presiden RIS: Surat Keputusan No. 239 tahun 1950 tanggal Agustus 1950 tentang pengangkatan Ir. M. Putuhana sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur.	1 lembar	Salinan	1950/08/15
206	Mr.A.K. Pringgogidgo Direktur Kabinet Presiden kepada anggota DPR: Surat tanggal 21 Agustus 1950 tentang ajakan untuk hearing di Parlemen sehubungan dengan pembentukan kabinet pertama negara Kesatuan RI	3 lembar	Pertinggal	1950/08/21
207	Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah kepada Direktur Kabinet Presiden: Kawat tanggal 23 Agustus 1950 tentang permohonan penetapan gubernur sumteng.	1 lembar	Asli	1950/08/23
208	Rakyat Cirebon kepada Presiden RIS: Surat tanpa tanggal tahun 1950 tentang sikap terhadap kesewenangan Residen Cirebon T. Durachman	1 lembar	Asli	1950
209	Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 1950 tentang perubahan PP No. 2 Tahun 1949 yaitu mengenai pembagian daerah dalam rayon.	1 lembar	Stensilan	-
	4. Keuangan			
210	Kementerian Keuangan: Surat Edaran tanggal 24 Desember 1949 tentang peraturan baru kendaraan bermotor pemerintah sipil.	1 lembar	Stensilan	1949/12/24
211	Surat-surat tanggal 20 Januari -29 Agustus 1950 tentang permohonan penurunan cukai tembakau, dengan lampiran.	1 sampul	Asli, Tembusan	1950/01/20 - 1950/08/29
212	Kabinet Presiden RIS: Surat-surat perhitungan keluar masuknya uang untuk diperhitungkan dalam bulan Januari-Desember 1950, dengan lampiran.	1 sampul	Pertinggal	1950/01/- , 1950/12/-
213	Menteri Keuangan RIS dan RI : Instruksi Bersama No. 53710/Kab tanggal 20 Maret 1950 tentang Jawatan Pajak Bumi RIS-RI.	1 lembar	Stensilan	1950/03/20
214	Pengumuman tanggal 23 Maret 1950 tentang petunjuk-petunjuk untuk penukaran uang RI dengan uang RIS sementara.	1 lembar	Konsep	1950/03/23
215	Menteri Keuangan: Surat Keputusan tanggal 24 Maret 1950 tentang pajak 1950.	1 lembar	Stensilan	1950/03/24
216	Burhan debitur bank di Palembang kepada Presiden RIS/Menteri Keuangan: Surat tanggal 7 April 1950 tentang sikap terhadap kebijakan pemotongan nilai uang (senering)	1 lembar	Asli	1950/04/07
217	Wakil Menteri Keuangan RI untuk Jawa Timur: Surat Keputusan No. 245/RI tanggal 25 April 1950 tentang pembentukan kantor pengiriman uang di Surabaya.	1 lembar	Stensilan	1950/04/25
218	Penyampaian buku pedoman keuangan RI sebagai pengganti dari rencana undang-undang keuangan RI tanggal 25 April 1950, dengan lampiran.	1 eksemplar	Asli	1950/04/25
219	Sekretaris Dewan Menteri RIS: Surat tanggal 29 April 1950 tentang penyampaian bahan rapat Dewan Menteri tanggal 2 Mei 1950, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/04/29
220	Menteri Keuangan RIS: Surat keputusan 29 April 1950 tentang pemberian kuasa menyewa pesawat, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/04/29
221	Surat-surat tanggal 29 April, 9 Agustus 1950 tentang penyehatan uang.	3 lembar	Asli	1950/04/29 - 1950/08/09
222	Pimpinan Panitia Pekerja PTMN: Surat tanggal 31 Mei 1950 tentang himbauan pemberian tunjangan non aktif.	1 lembar	Tembusan	1950/05/31

223	Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri: Surat-surat tanggal 2, 23 Juni 1950 tentang pengiriman panitia klaim terhadap kredit surplus ke Washington, dengan lampiran.	3 lembar	-	1950/06/02, 1950/06/23
224	Jawatan Sandi: Biaya pengiriman kawat ke luar negeri tanggal 5 Juni 1950.	1 lembar	-	1950/06/05
225	Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden: Surat tanggal 10 Juni 1950 tentang penyampaian bahan rapat Dewan Menteri dari bagian ekonomi Kementerian Dalam Negeri, dengan lampiran.	2 lembar	Stensilan	1950/06/10
226	Nota Tanggal 27 Juni 1950 tentang Javasche Bank.	1 lembar	Stensilan	1950/06/27
227	Menteri Keuangan: Surat-surat Keputusan tanggal 29 Juli, 15 Agustus 1950 tentang pemberian kuasa untuk mengeluarkan sejumlah uang.	3 lembar	Salinan	1950/07/29, 1950/08/05
228	Perdana Menteri RIS: Surat Edaran tanggal 9 Agustus 1950 tentang penetapan tentang penetapan pihak yang bertanggung jawab atas anggaran bag. I.	1 lembar	Salinan	1950/08/09
229	Direktur Kabinet Presiden kepada Ir. Teko Soemodiwirjo Sekretaris Jenderal Menteri Kehakiman: Surat-surat tanggal 11, 24 Agustus 1950 tentang permohonan devizeen dari O.A Musch untuk perusahaannya.	2 lembar	Pertinggal	1950/08/11, 1950/08/24
230	Menteri Keuangan: surat Keputusan tanggal 12 Agustus 1950 tentang penyesuaian kurs dolar-rupiah di kepulauan Riau.	1 lembar	Stensilan	1950/08/12
231	Menkeu RIS: Surat Keputusan tanggal 14 Agustus 1950 tentang pemberian surat kuasa sebagai panitia likuidasi.	2 lembar	Petikan	1950/08/14
232	Presiden RIS: Surat Keputusan No. 236 tanggal 15 Agustus 1950 tentang kedudukan direktur lembaga alat-alat pembayaran luar negeri.	1 lembar	Salinan	1950/08/15
233	Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri kepada Jawatan Urusan Umum: Surat tanggal 13 April 1950 tentang penyampaian surat-surat dari masyarakat mengenai ORI.	1 lembar	Tembusan	1950/04/13
234	Menteri Keuangan kepada Menteri kehakiman : Surat tanggal 31 Oktober 1950 tentang tabungan dennis, dengan lampiran. NB: dalam Bahasa Belanda.	2 lembar	Asli	1950/10/31
235	Kantor pusat perbendaharaan RI Jakarta: Surat edaran tanggal 30 Nopember 1950 tentang ketentuan pertanggungjawaban permohonan uang persediaan.	1 lembar	Stensilan	1950/11/30
236	Sekretaris Perdana Menteri RIS kepada Agus Masjarif: Surat tanggal 20 April 1950 tentang tunjangan pensiun janda atas nama Ny. Masjarif, dengan lampiran.	3 lembar	Pertinggal	1950/04/20
237	Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1950 tanggal 24 Juli 1950 tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda.	1 lembar	Stensilan	1950/07/24
238	Rancangan Undang-undang tahun 1950 tentang pengadaaan dan pemungutan pajak daerah.	1 lembar	Konsep	-
239	Kabinet Presiden Republik Indonesia kepada Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri: Surat tanggal 11 Desember 1950 tentang Surat Edaran No. 160 tanggal 26 April 1950 yaitu mengenai penanggungan kerusakan, dengan lampiran.	1 sampul	Tembusan	1950/12/11, 1950/04/26
240	Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. P.U/1/1950 tanggal 19 Maret 1950 tentang perbankan.	1 lembar	Stensilan	1950/03/19
	5. Kemakmuran			
241	Menteri Kemakmuran RI Kepada Sekretaris Negara RI: Daftar nama pegawai di lingkungan Kementerian Kemakmuran tanggal 31 Desember 1949, dengan lampiran.	2 lembar	Stensilan	1949/12/31
242	Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Negara di Jogjakarta: surat tanggal 12 Januari 1950 tentang kontrak pembelian barang-barang dari Belanda, dengan lampiran.	2 lembar	Pertinggal	1950/01/12
243	Wakil dagang NRI di Singapura kepada Presiden RIS: Surat tanggal 15 Januari 1950 tentang keluhan atas sikap pejabat Kementerian Kemakmuran mengenai kontrak pembelian kopra, disertai surat pengantar.	2 lembar	Salinan	1950/01/15

244	Direktur Kabinet Presiden RI kepada Menteri Kemakmuran: Surat-surat tanggal 21 Januari -22 Maret 1950 tentang perdagangan dengan luar negeri, dengan lampiran.	1 sampul	Asli, Peninggal	1950/01/21 - 1950/03/22
245	Perhimpunan perdagangan PKR " Amandit" kepada Menteri Kemakmuran RIS: Surat tanggal 6 Februari 1950 tentang saran untuk mengadakan perdagangan langsung ke luar negeri	1 lembar	Tembusan	1950/02/06
246	Gardo kepada PM RIS: surat tanggal 11 Februari 1950 tentang permintaan stok barang untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan di Borneo.	1 lembar	Asli	1950/02/11
247	K. A. Ontoeng kepada Presiden Soekarno: Surat tanggal 13 Februari 1950 tentang saran di bidang pembangunan ekonomi Indonesia.	1 lembar	Asli	1950/02/13
248	P. Telder kepada Presiden RIS: surat tanggal 20 Februari 1950 tentang pengiriman artikel mengenai situasi ekonomi- politi di Indonesia pada bulan November 1947, dengan lampiran. NB: dalam bahasa Belanda.	1 lembar	Asli	1950/02/20
249	Kepala pemerintah di Sabang pemangku kekuasaan militer: Undang-undang No. 1 tahun 1950 tanggal 7 Maret 1950 tentang pengangkutan barang bukan hasil rakyat ke luar Pulau Weh.	1 lembar	Stensilan	1950/03/07
250	Menteri Keuangan kepada Presiden RIS: Surat tanggal 8 Maret 1950 tentang penjualan sero kepunyaan pemerintah dari bataviasche model Boenderej, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/03/08
251	Manajer NV" Korea Trading Coy" kepada gubernur Sumatera Tengah: Surat tanggal 19 Maret 1950 tentang permohonan mengajukan kegiatan pembangunan di Sumatera Tengah, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/03/19
252	Gerakan Tani Karem Indonesia cabang Pematang tanah Jawa kepada Presiden RIS: Mosi tanggal 19 Maret 1950 tentang perbaikan bendar bali horas untuk pengairan sawah.	1 lembar	Asli	1950/03/19
253	Surat tanggal 27 Maret 1950 tentang permohonan harga mobil dengan harga pemerintah.	1 lembar	Asli	1950/03/27
254	Jawatan Penerimaan Kementerian Kemakmuran : Surat tanggal 30 Maret 1950 tentang pemberian kuasa kepada Hardiman untuk menandatangani semua surat-surat dan lisensi.	1 lembar	Stensilan	30/03/1950
255	Surat tanggal 6 Mei 1950 tentang permohonan pengembalian status tambang bukit asam kepda RI.	1 lembar	Salinan	1950/05/06
256	Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat tanggal 24 Mei 1950 tentang pengaduan untuk menyelidiki pendistribusian rakyat di sangir Talaud.	2 lembar	Asli	1950/05/24
257	Kantor urusan perlengkapan dan pembayaran Kementerian Kemakmuran: Surat Edaran tanggal 26 Mei 1950 tentang pengurangan barang-barang distribusi.	1 lembar	Stensilan	1950/05/26
258	Surat tanggal 27 Mei 1950 tentang persetujuan perdagangan antara RIS dengan Jepang dalam masa pendudukan (bahan rapat dewan Menteri), dengan lampiran.	2 lembar	Stensilan	1950/05/27
259	Menteri Kemakmuran kepada Menkeu: Surat tanggal 15 Juni 1950 tentang rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan sokongan atas komoditi pertanian, dengan lampiran.	2 lembar	Tembusan	1950/06/15
260	Organisasi massa: Resolusi-resolusi tanggal 25 Juni, 2 November 1950 tentang rasionalisasi	2 lembar	Stensilan	1950/11/02, 1950/06/25
261	Menteri Kehakiman kepada ketua Mahkamah agung: Surat tanggal 28 Juni 1950 tentang permohonan Lo Musiah untuk menebus sawah, dsertai surat pengantar.	2 lembar	Peninggal	28/06/1950
262	Sekretaris Jenderal Menteri kemakmuran kepada Francis Theseira: Surat tanggal 21 Juli 1950 tentang permohonan untuk menjadi perwakilan perdagangan Indonesia untuk Malaysia dan Singapura.	1 sampul	Tembusan	21/07/1950

263	Kepala Jawatan Perindustrian kementerian Kemakmuran kepada Direktur Presiden RIS: Surat tanggal 1 Juli 1950 tentang Percival G. Leslie yang ingin menjadi perantara dalam pembelian peralatan pengolah minyak dan gula dengan lampiran.	3 lembar	Asli	1950/07/1
264	Kapus Jawatan Perindustrian kepada masauni Shiraisi: Surat tanggal 31 Juli 1950 tentang peninjauan atas usul untuk membntu mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia.	1 lembar	Tembusan	1950/07/31
265	Surat-surat tanggal 19 Agustus, 1 Desember 1950 tentang pembentukan Ikatan Toko-toko Indonesia (ITTI) di Jogjakarta.	1 sampul	Asli, Tembusan	1950/08/19, 1950/12/01
266	Presiden Ri: Undang-Undang Darurat No. 31 tanggal 23 Agustus 1950 tentang pemungutan bea berat barang.	1 lembar	Stensilan	1950/08/23
267	Wakil notaris di Bandung kepada Menteri kehakiman : surat tanggal 29 Agustus 1950 tentang permohonan mendirikan N.V. " Mascotte Trading Co. Limited", dengan lampiran.	1 sampul	Tembusan	1950/08/29
268	Kantor Pusat Statistik: daftar statistik harga beras di pasar bebas tanggal 12 Oktober 1950.	1 lembar	Stensilan	1950/10/12
	6. Kehakiman			
269	Surat-surat tanggal 19 Desember 1949, 11 maret 1950 tentang tawanan KNIL di Ambarawa Jawa Tengah.	5 lembar	Asli	1949/12/19, 1950/03/11
270	Surat-surat tanggal 20 Desember 1949-14 Juli 1950 tentang tahanan-tahanan politik di berbagai wilayah di Indonesia.	1 sampul	Asli	1949/12/20 - 1950/07/14
271	Badan Penerbit Warga kepada Menteri Penerangan RIS: Resolusi tanggal 29 Desember 1949 tentang tuntutan keadilan bagi penerbit Indonesia.	1 lembar	Tembusan	1949/12/29
272	Surat-surat tanggal 11 Januari- 8 November 1950 tentang permohonan menjadi warga negara Indonesia.	1 sampul	Asli, Tembusan	1950/01/11 - 1950/11/08
273	Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung RIS: Surat tanggal 12 Januari 1950 tentang pemberantasan penyelundupan di T. Pinang , dengan lampiran.	1 sampul	Tembusan	1950/01/12
274	Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 12 Januari -13 Juli 1950 tentang rancangan undang-undang jabatan politik, berkuasa, kehakiman dan pemimpin.	1 sampul	Pertinggal	1950/01/12 - 1950/07/13
275	Ikatan Pemuda Indonesia Maluku (IPIM) kepada Presiden RIS: Resolusi tanggal 30 Januari 1950 tentang desakan agar menangkap dan memproses secara hukum terhadap Westerling, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/01/30
276	Residen Kepala Pemerintah Sementara di Palembang: Keputusan No. 8/K.P.S. tanggal 4 Februari 1950 tentang penarikan verordening van het militair gezag No. 1 yang ditetapkan dengan besluit No. 48/HTB tanggal 9 April 1949 mengenai pembatasan pengangkutan peralatan rumah tangga tanpa seijin kepala negeri, dengan lampiran.	2 lembar	Salinan	1950/02/04, 1949/04/09
277	Presiden RIS kepada Ketua Senat RIS: Surat tanggal 6 Maret 1950 tentang susunan pimpinan Mahkamah Agung RIS.	3 lembar	Salinan	1950/03/06
278	Ex staf Local Inteljeen Service Operatie kepada Presiden RIS: Surat tanggal 17 Maret 1950 tentang saran pemberantasan korupsi.	1 lembar	Asli	1950/03/17
279	Surat-surat tanggal 22 April, 10, 12 Mei, 3 Juni 1950 tentang permohonan peninjauan kembali dan pembebasan dari hukuman.	5 lembar	Asli, Tembusan	1950/04/22, 1950/05/10, 1950/05/12, 1950/06/03
280	Surat-Surat permohonan grasi tanggal 28 Maret- 15 November 1950.	1 sampul	Tembusan	1950/03/28 - 1950/11/15
281	Jaksa Agung kepada Kabinet Presiden RI Surat tanggal 29 April 1950 tentang penangkapan atas pemeluk agama Budha Djawi, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/04/29
282	R.A. Soesilo: Surat tanggal 27 April 1950 tentang sikap terhadap kesewenangan T. Anwar bekas anggota DPR Sumatera Tengah.	1 lembar	Asli	1950/04/27
283	Panitia Penghubung Perwakilan RIS: Laporan tanggal 28 April 1950 tentang insiden Makassar.	1 lembar	Stensilan	1950/04/28

284	Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Kehakiman: Surat tanggal 5 Mei 1950 tentang pembagian waris. NB: lampiran tidak ada	1 lembar	Pertinggal	1950/05/05
285	Panitia Pembangunan Perekonomian Indonesia Medan kepada Presiden RIS: Resolusi tanggal 22 Mei 1950 tentang permohonan keadilan atas hak pemilikan rumah, dengan lampiran.	1 sampul	Asli	1950/05/22
286	Jaksa agung kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat tanggal 31 Mei 1950 tentang penyelidikan kematian P. Adam Kutty.	1 lembar	Asli	1950/05/31
287	Kementerian Kehakiman: Surat-surat tanggal 16 Juni, 13 Juli 1950 tentang penolakan dispensi hukum kepada warga negara Belanda.	2 lembar	Tembusan	1950/06/16, 1950/07/13
288	Kesatuan Aksi Umat Islam Semarang: resolusi tanggal 2 Juli 1950 tentang tuntutan untuk melarang segala macam perjudian.	1 lembar	Asli	1950/07/02
289	Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Kemakmuran: Surat tanggal 14 Juli 1950 tentang penyelundupan timah di Bangka, dengan lampiran.	1 sampul	Pertinggal	1950/07/14
290	Surat-surat tanggal 28 Juli, 7 Agustus 1950 tentang keluhan terhadap sikap polisi.	2 lembar	Asli	1950/08/07
291	Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Presiden RIS: Surat tanggal 12 Agustus 1950 tentang hasil penyelidikan terhadap permohonan ijin untuk mendirikan perusahaan Sultan van Affandi dan H.C. Langkun. Dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/08/12
292	Banggu kkepada Jaksa agung pada Mahkamah Agung Indonesia: Surat tanggal 11 Oktober 1950 tentang permohonan amnesti.	1 lembar	Tembusan	1950/10/11
293	S.J. Lanwaia kepada Gubernur Sunda kecil: Surat tanggal 18 Oktober 1950 tentang permohonan keadilan pemilikan rumah, dengan lampiran.	1 lembar	Tembusan	1950/10/18
294	Muktamar Wanita Se - Sumatera Timur: Resolusi tanggal 18 November 1950 tentang tuntutan persamaan hak wanita dengan pria.	1 lembar	Asli	1950/11/18
	7. Perhubungan			
295	Sekretaris Menteri kehakiman kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Jogjakarta: Surat tanggal 13 Desember 1950 tentang keperluan kendaraan bermotor untuk mengangkut tahanan.	3 lembar	Asli	1950/12/13
296	Ir. H. Laah kepada Presiden RIS: Surat tanggal 29 desember 1949 tentang pemberitahuan jabatannya sebagai menteri perhubungan tenaga dan pekerjaan umum.	1 lembar	Asli	1949/12/29
297	Tjan Boen Liang, Sumatra Transport Corporation kepada Menteri Lalu Lintas bagian pengangkutan oto bus: Surat-surat tanggal 9 Januari, 14 Maret 1950 tentang permohonan ijin trayek untuk wilayah Tangerang-Mauk-Tangerang dan sumatra.	2 lembar	Tembusan	1950/01/09, 1950/03/14
298	Menteri Perhubungan Tenaga dan pekerjaan Umum: Pengumuman tanggal 9 Januari 1950 tentang penggabungan Jawatan Pelayaran RI dengan Departemen van Scheepvaart.	1 lembar	Stensilan	1950/01/09
299	Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum: Surat penetapan tanggal 24 Januari 1950 tentang pengangkatan Dr. Ir.J.C.L.B sebagai pegawai tinggi pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum.	1 lembar	Stensilan	1950/01/24
300	Cv Oesaha Kita Bersama kepada Presiden RIS: Surat tanggal 10 Februari 1950 tentang permintaan bantuan dalam rangka pembentukan pelayaran di Indonesia, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/02/10
301	Sekretaris Perdana Menteri RIS kepada Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum: surat tanggal 10 Maret 1950 tentang persetujuan permohonan kendaraan untuk dinas Jawatan Sandi, dengan lampiran.	2 lembar	Konsep	1950/03/10

302	Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum: Instruksi tanggal 21 Maret 1950 tentang Jawatan Pekerjaan Umum dari Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS dalam daerah-daerah TBA, recomba dan daerah-daerah bagian yang termasuk dalam daerah Republik Indonesia.	1 lembar	Stensilan	1950/03/21
303	Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum: Surat ketetapan tanggal 31 Maret 1950 tentang pengangkatan dan pemberhentian.	1 sampul	Salinan	1950/03/31
304	Serikat-serikat Buruh: Resolusi-resolusi tanggal 28 Mei - 4 Juli 1950 tentang penentangan terhadap penghapusan DAMRI.	1 sampul	Asli, Tembusan	1950/07/04
305	Jawatan Pos Telegrap dan Televisi: Surat Keputusan tanggal 7 Juni 1950 tentang pemberian ijin penggunaan stasiun telpon radio di perkebunan	1 lembar	Stensilan	1950/06/07
306	Jawatan Urusan Daerah Kotapraja Jakarta Raya kepada Sekretaris Kabinet Presiden: Surat tanggal 13 Juni 1950 tentang kendaraan-kendaraan bekas instansi gubernuran.	1 lembar	Tembusan	1950/06/13
307	Direktur Firma Deli-Langkat Trading Company kepada Presiden RIS: Surat tanggal 24 Juni 1950 tentang permohonan penjelasan mengenai ijin mengangkut hasil bumi, dengan lampiran	2 lembar	Asli	1950/06/24
308	Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum: Surat Keputusan tanggal 24 Juni 1950 tentang ketentuan penggunaan plat kendaraan bermotor untuk perwakilan Indonesia di luar negeri.	1 lembar	Stensilan	1950/06/24
309	Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum: Surat tanggal 4 Juli 1950 tentang permohonan Siswardoyo untuk membeli kembali bekas rumahnya.	1 lembar	Tembusan	1950/07/04
310	Jwatan Angkutan Darat dan Sungai : Surat Pemberitahuan tanggal 13 Juli 1950 tentang penggantian Motor Transports Dienst menjadi Jawatan Angkutan Darat dan Sungai.	1 lembar	Stensilan	1950/07/13
311	Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat tanggal 22 Juli 1950 tentang permintaan 5 orang wanita yang menghedaki agar kereta api cepat Semarang, Cirebon dan Bandung berhenti di stasiun Jatinegara.	1 lembar	Asli	1950/07/22
	8. Kesehatan			
312	Menteri Kesehatan: Surat tanggal 17 Januari 1950 tentang keputusan-keputusan mengenai tarif perawatan di rumah sakit militer.	1 lembar	Salinan	1950/01/17
313	Menteri Kesehatan: Surat-surat keputusan tanggal 24 Februari, 19 Juli 1950 tentang penanggulangan dan pencegahan berjangkitnya berbagai penyakit di daerah-daerah, dengan lampiran.	1 sampul	Stensilan	-/02/24 , 1950/07/19
314	menteri Kesehatan Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 12 April 1950 tentang rencana Republik Indonesia Serikat menjadi Anggota WHO.	1 lembar	Asli	12/04/1959
315	Pengurus Besar PMI kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 24 Juli 1950 tentang pengakuan kepada PMI sebagai anggota palang merah Internasional, dengan lampiran.	2 lembar	Asli	1950/07/24
	9. Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan			
316	Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat-surat keputusan tanggal 10 Oktober, 30 November 1949, 23 Januari 1950.	5 lembar	Stensilan	-/10/10, 1949/11/30, 1950/01/23
317	Dewan Pimpinan PNI Kalimantan Selatan: Putusan Konferensi tanggal 11 Januari 1950 tentang tuntutan wajib belajar agar selekas mungkin dilaksanakan.	1 lembar	Stensilan	1950/01/11
318	surat-surat tanggal 22 Januari, 30 Agustus, 1 September 1950 tentang pegawai farmasi di Belanda Subianto yang meminta ijin untuk meneruskan study di Belanda, dengan lampiran.	1 sampul	Tembusan, Asli	-/01/22, -/08/30, 1950/09/01
319	Menteri Penerangan kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat-surat tanggal 6 Februari, 18 April 1950 tentang buku : Detik dan Republik Indonesia Serikat."	4 lembar	Asli	-/02/06, 1950/04/18

320	Partindo dan Parindra: Surat tanggal 7 februari 1950 tentang kebudayaan nasional.	1 lembar	Asli	07/02/1950
321	Organisasi massa: Resolusi-resolusi tanggal 10 Februari, 27 April 1950 tentang desakan untuk negara melaksanakan peraturan pemerintah No. 32 tahun 1949 mengenai penghargaan terhadap pelajar pejuang.	1 sampul	Asli	-/02/10, 1950/04/27
322	Persatuan Perguruan Islam BARABAI: Mosi tanggal 13 Februari 1950 tentang tuntutan agar mata pelajaran islam menjadi mata pelajaran wajib bagi anak-anak yang beragama Islam.	1 lembar	Asli	1950/02/13
323	IPPI: Mosi tanggal 28 februari 1950 tentang tuntutan untuk memperluas sekolah-sekolah kejuruan, disertai surat pengantar.	4 lembar	Pertinggal	1950/02/26
324	Dr. Abu Hanifah Menteri Pendidikan pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 4262/Kab/1950 tanggal 1 Maret 1950 tentang lapangan pekerjaan dan susunan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat.	1 lembar	Salinan	1950/03/01
325	Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan tanggal 10 Maret 1950 tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.	1 lembar	Stensilan	1950/03/10
326	Bidan Indonesia Jawa Tengah: Resolusi tanggal 9 April 1950 tentang dsakan untuk memasukkan pendidikan jururawat/bidan Indonesia dalam rencana Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI dan Republik Indonesi Serikat.	1 lembar	Asli	1950/04/09
327	Rapat gabungan NU Cabang Jember kepada Menteri Agama RIS: Surat tanggal 24 April 1950 tentang Undang-undang Pokok Pengajaran.	1 lembar	Tembusan	1950/04/24
328	Pelajar sekolah Guru Islam Malang kepada Presiden Soekarno: Surat tanggal 11 Mei 1950 tentang permohonan agar pelajar putri dapat diterima di sekolah guru/hakim islam, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/05/11
329	Presiden RIS kepada Ketua DPR: Surat tanggal 17 Mei 1950 tentang Undang-undang Darurat tanggal 23 Januari 1950 yaitu mengenai perguruan tinggi, dengan lampiran.	8 lembar	Pertinggal	1950/05/23
330	Sekretaris Menteri Penerangan untuk urusan penerangan luar negeri kepada Dr. Raghir Vira: Surat tanggal 5 Juni 1950 tentang usul penerbitan sejarah dan Kesusastraan Indonesia. NB: sebagian arsip rusak.	1 lembar	Tembusan	1950/06/05
331	Soekonyono kepada Ir. Soekarno: Surat tanggal 26 Juni 1950 tentang pembukaaan sekolah Tehnik di Blitar.	1 lembar	Asli	1950/06/26
332	Surat-surat tanggal 28 Juni, 16 Agustus 1950 tentang komentar terhadap rencana pembuatan patung presiden di Sumbawa.	1 sampul	Tembusan	-/06/28 , 1950/08/16
333	Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Penerangan RI Jogjakarta: Surat tanggal 30 Juni 1950 tentang pemberian kata pengantar dari Presiden untuk buku: "Jenderal Soedirman".	2 lembar	Pertinggal	1950/06/30
334	Persatuan Pelajar Indoesia Partikelir (PERPIP) kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Resolusi tanggal 1 Juli 1950 tentang desakan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan ijazah negara.	1 lembar	Asli	1950/07/01
335	Direktur Kabinet Presiden RIS kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan ; Sura tanggal 18 juli 1950 tentang kata pengantar untuk buku penuntun bahasa Inggris karangan J.J. Balkler, dengan	2 lembar	Asli	1950/07/18
336	Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri dalam Negeri: surat tanggal 12 Juli 1950 tentang permohonan mencegah penjualan barang peninggalan Teuku Umar, dengan lampiran.	2 lembar	Pertinggal	1950/07/12
337	Soetosokario kepada Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat tanggal 14 Agustus 1950 tentang pengiriman buku wayang.	1 lembar	Asli	1950/08/14
338	Panitia Kebudayaan: Hasil sidang tanggal 21 Agustus 1950 di Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.	1 lembar	Konsep	1950/08/21

339	Rancangan perjanjian kebudayaan antara Republik Indonesia Serikat dengan Belanda tahun 1950. NB: dalam bahasa Inggris dan Belanda.	4 lembar	Konsep	1950
10. Sosial				
340	Warga Negara Indonesia di Surabaya kepada Presiden: Surat tanggal 21 Januari 1950 tentang sikap terhadap situasi rakyat pada umumnya.	1 lembar	Asli	1950/01/21
341	Anwar Bey kepada Presiden republik Indonesia Serikat: Resolusi tanggal 30 Januari 1950 tentang permintaan agar pemerintah mengumumkan secara resmi mengenai kematian Tan Malaka.	1 lembar	Asli	1950/01/30
342	Mahmuddin Sjam kepada Presiden RIS: Surat tanggal 9 Februari 1950 tentang permohonan perbaikan nasib, dengan lampiran.	3 lembar	Asli	1950/02/09
343	Pelajar Perjuangan Kanisius surakarta kepada Acting Presiden RI: Surat tanggal 1 Mei 1950 tentang permohonan pelaksanaan PP No. 32 dijadikan UU RIS, dengan lampiran.	3 lembar	Asli	1950/05/01
344	Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Madiun: Resolusi tanggal 3 April 1950 tentang perbaikan ekonomi.	1 lembar	Asli	1950/04/03
345	Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Kemakmuran: Surat tanggal 8 April 1950 tentang permohonan Sukirman supaya beras untuk rakyat daerah Toli-toli diatur, dengan lampiran.	3 lembar	Pertinggal	1950/04/08
346	Ormas: Mosi tanggal 6 Juni 1950 tentang santunan kepada pegawai negeri yang co dan non co.	1 lembar	Tembusan	1950/06/06
347	Menteri Agama kepada Sjech Ahmad bin Salim bin Mahfoed: Surat tanggal 28 Juni 1950 tentang permohonan nang sedekah untuk berziarah ke Mekah.	1 lembar	Tembusan	1950/06/28
348	Wakil Kepala Pusat Jawatan Pertambangan: surat pemberitahuan tanggal 7 Juli 1950 tentang kemungkinan meletusnya Gunung Tangkuban Perahu, disertai surat pengantar.	2 lembar	Asli	1950/07/07
349	Residen Semarang: Keputusan No. 310 tanggal 11 Juli 1950 tentang penghentian penyitaan terhadap gedung-gedung militer Belanda.	2 lembar	Asli	1950/07/11
350	Badan pembantu Keluarga Korban Perjuangan Pusat Karesidenan Besuki kepada Menteri Pertahanan: Surat tanggal 18 Nopember 1950 tentang jaminan kesejahteraan sosial.	1 lembar	Tembusan	1950/11/18
11. Perburuhan				
351	Berkas tanggal 1 Januari -16 Agustus 1950 tentang perburuhan.	1 sampul	Asli, Tembusan	1950/01/01 - 1950/08/16
352	Anggota KNIP utusan Sumatra Timur kepada Gubernur Propinsi Tapanuli sumatra Timur: surat tanggal 17 Januari 1950 tentang nasib pegawai negeri RI yang non cooperative.	1 lembar	Tembusan	1950/01/17
353	SOBSI Cabang Bogor: Resolusi tanggal 26 Januari 1950 tentang desakan untuk merubah dalam peraturan distribusi pegawai-pegawai RI.	Asli	1 lembar	1950/01/26
354	Wedana Distrik Federal Bekasi : surat Keputusan tanggal 6 Februari 1950 tentang penyerahan tugas.	Asli	1 lembar	1950/02/06
355	Presiden Republik Indonesia Serikat: Keputusan tanggal 10 Februari 1950 tentang pengangkatan anggota-anggota panitia untuk meninjau soal pegawai negeri yang berasal dari Irian.	Salinan	1 lembar	1950/02/10
356	Kepala Pemerintah Republik Indonesia Serikat daerah Padang dan sekitarnya: surat Perintah tanggal 1 Maret 1950 untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari menggantikan pejabat yang sedang berkunjung ke Jakarta.	Stensilan	1 lembar	1950/03/01
357	Republik Indonesia Serikat: Penetapan tanggal 6 Maret 1950 tentang penugasan kepada J.W. Zijp dan J.A.S Fransen van der Putte pada Kabinet Perdana Menteri.	Kutipan	1 lembar	1950/03/06
358	Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat kepada Direktur Kabinet Presiden RIS: surat tanggal 5 Juli 1950 tentang permohonan R.E. Kosasih supaya ditempatkan kembali sebagai pegawai negeri, dengan lampiran.	Asli	2 lembar	1950/07/05

359	Serikat Buruh kereta Api (SBKA): Resolusi tanggal 20 Maret 1950 tentang desakan agar Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947 dan Undang-undang Kerja tahun 1948 menjadi Undang-undang Republik Indonesia Serikat	Tembusan	1 lembar	1950/03/20
360	Jawatan Sandi kepada Perdana Menteri RIS: Surat tanggal 1 Juni 1950 tentang susunan dan formasi Jawatan Sandi.	Asli	1 sampul	1950/06/01
361	Kesatuan Juru Kesehatan Indonesia (KDKI) Sumatra: Rsesolusi tanggal 10 April 1950 tentang sentralisasi terhadap juru-juru kesehatan, disertai surat pengantar.	Asli	2 lembar	1950/04/10
362	Surat-surat tanggal 21 April , 2, 7 Juni, 15 oktober 1950 tentang sikap terhadap pegawai co dan non co.	Asli	4 lembar	1950/04/21, 1950/06/02 , 1950/06/07, 1950/10/15
363	Komisaris SOBSI Daerah jogjakarta: Resolusi tanggal 1 Mei 1950 tentang sikap terhadap keadaan/ situsasi yang meyangkut penghidupan rakyat.	Salinan	1 lembar	01/05/1950
364	Dewan Pimpinan Kongres Pemuda Seluruh Bali: Mosi tanggal 5 mei 1950 tentang desakan agar bekas pejuang gerilya di Bali diresmikan menjadi TNI.	Turunan	1 lembar	1950/05/05
365	Presiden RIS: surat Keputusan tanggal 3 Juni 1950 tentang pengangkatan Mr. kasasih Purwanegara sebagai acting menteri perburuhan selama Mr. Wilopo berpergian.	Konsep	1 lembar	1950/06/03
366	P.H.J.M Theunissen kepada Presiden : Surat tanggal 18 Juli 1950 tentang pengangkatan PH YM Theumissen sebagai direktur sekolah menengah R.K di Tomohon Makassar. NB dalam bahasa Belanda	Stensilan	1 lembar	1950/07/18
367	Serikat Sekerja Jawatan Perdagangan 9SSDP) Semarang: resolusi tanggal 25 Juli 1950 tentang penempatan pegawai yang sesuai dengan perjuangan nasional dan perkembangan negara.	Tembusan	1 lembar	1950/07/25
368	Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Perdana Menteri: Surat tanggal 10 Agustus 1950 tentang pembhentian Sutrisno sebagai ka. Jawatan umum Pegawai, dengan lampiran.	Pertinggal	2 lembar	1950/08/10
369	Surat tanggal 22 Agustus 1950 tentang permohonan untuk dapat dipekerjakan kembali pada Jawatan Garam Pusat	Tembusan	1 lembar	1950/08/22
370	Surat-surat tanggal 24 Januari -16 Agustus 1950 tentang gaji dan tunjangan jabatan.	Asli, Tembusan	1 sampul	1950/01/24 - 1950/08/16
	12. Agama			
371	Rakyat kepada Presiden: Surat tanggal 24 Oktober 1950 tentang kerukunan beragama.	Asli	1 lembar	1950/10/24
372	Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan No. 48 tanggal 30 Januari 1950 tentang pengangkatan Mohammad Kafrawi sebagai Sesjen Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat.	Konsep	1 lembar	1950/01/30
373	Menteri Agama Republik Indonesia Serikat: surat Keputusan tanggal 6 Februari 1950 tentang pembentukan badan dengan nama" Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PHI).	Tembusan	1 lembar	1950/02/06
374	Kementerian Agama: surat Edaran tanggal 8 Februari 1950 tentang usul penghapusan sebutan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia dan Paduka Tuan.	Salinan	1 lembar	1950/02/08
375	Surat-surat tanggal 9 Februari -11 mei 1950 tentang haji, dengan lampiran.	Asli	1 sampul	1950/02/09 - 1950/05/11
376	Sekretaris ULI: surat tanggal 13 Maret 1950 tentang usaha kaum Nasrani dalam upaya penyelenggaraan agama.	Kutipan	1 lembar	1950/03/13
377	PRI kemanusiaan: Mosi tanggal 19 Maret 1950 tentang desakan diadakan RAT agama islam, dengan lampiran.	Asli	2 lembar	1950/03/19
378	Menteri Agama Republik Indonesia Serikat: Maklumat tanggal 1 April 1950 tentang jam kantor pemerintahan hari raya Tionghoa.	Stensilan	1 lembar	1950/04/01

379	Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Serikat dan RI Tanggal 7 Juni 1950 tentang dasar-dasar mempersatukan Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat dan RI, dengan lampiran.	Stensilan	1 sampul	1950/06/07
380	Surat-surat tanggal 5 Juli, 15 agustus 1950 tentang permohonan pemasangan besi pengekeran eks kapal Jepang ke menara masjid.	Asli	4 lembar	1950/07/05 , 1950/08/15
381	Mr. R. Tirtawinata Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Direktur Kabinet Presiden RIS : Surat tanggal 28 Juli 1950 tentang laporan voorwinden administrateur pada Jawatan Urusan Umum Pegawai mengenai " <i>beknopte goddelijke openbaring</i> ", dengan lampiran.	Asli	2 lembar	1950/07/28
	13. Penerangan			
382	Radio Republik Indonesia: Laporan-laporan tanggal 14, 15 Desember 1949.	Tindakan	3 lembar	1949/12/14, 1949/12/15
383	Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan: Surat keputusan tanggal 27 Desember 1949 tentang Jawatan RRI Serikat.	Stensilan	1 lembar	1949/12/27
384	Mr. Sunaryo: Nota tanggal 27 desember 1949 tentang pembentukan negara serikat.	Copy	1 lembar	1949/12/27
385	Kepala Rumah Sakit Militer Spanyol kepada Presiden : Surat tanggal 28 Januari 1950 tentang permintaan data sehubungan dengan rencana penerbitan buku referensi , disertai surat pengantar.	Pertinggal	2 lembar	1950/01/28
386	Mr. R Tirtawinata kepada Menteri Luar Negeri RIS: Surat tanggal 15 maret 1950 tentang perjanjian persahabatan dan saling bantu antara Tiongkok dan Rusia, dengan lampiran.	Tembusan	4 lembar	1950/03/15
387	Kementerian Penerangan: Ikhtisar parlemen tanggal 20 Februari 1950.	-	1 lembar	1950/02/20
388	Ormas di Pare-pare: Mosi tanggal 21 Februari 1950 tentang tuntutan untuk tidak menekan suara pers.	Asli	1 lembar	1950/02/21
389	Kementerian Penerangan: siaran dokumentasi tanggal 23 Maret 1950 biografi menteri/anggota kabinet Republik Indonesia Serikat.	Stensilan	1 lembar	1950/03/23
390	Kementerian Penerangan: Laporan dinas harian tanggal 15 Mei 1950.	Stensilan	1 lembar	1950/05/15
391	Menteri Sosial kepada Direksi IPPRESS: surat tanggal 16 Mei 1950 tentang dukungan atas usul IPPRESS sebagai penyelenggara pemasangan periklanan.	Tembusan	1 lembar	1950/05/16
392	Kementerian Penerangan kepada Irene Elms: Surat tanggal 27 Mei 1950 tentang publikasi mengenai Indonesia. NB: Kertas rusak	Pertinggal	1 lembar	1950/05/27
393	Sekretaris Presiden Mr. S. Brotodiningrat kepada Direksi Escomptobank NV: Surat-surat tanggal 12 Juni, 5 , 14 Juli 1950 tentang penyampaian berita tahunan, dengan lampiran.	Asli	1 sampul	1950/06/12, 1950/07/05, 1950/07/14
394	Direktur Kabinet Presiden kepada Direksi Penerbitan Nasional Umar Mansoor: surat tanggal 29 Juni 1950 tentang keberatan Presiden Soekarno atas penamaan masjid Soekarno.	Pertinggal	2 lembar	1950/06/29
395	Kantor Berita APB: Buletin tanggal 12 Agustus 1950.	Stensilan	1 lembar	1950/08/12
396	Presiden Republik Indonesia Serikat: Piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan RI pada tanggal 15 Agustus 1950, dengan lampiran.	Salinan	2 lembar	1950/08/15
397	Partai Islam Indonesia: Pamflet tanggal 9 Oktober 1950 tentang berdirinya Partai Islam Indonesia.	-	1 lembar	1950/10/09
398	Menteri Penerangan : Surat usulan tahun 1950 tentang penghapusan : Presbreidel-Ordonantie".	Konsep	1 lembar	1950
399	Dinas Agama Staf "A" Angkatan Darat: Siaran radio tanggal 11 Agustus 1950 tentang sekitar proklamasi.	Stensilan	1 lembar	1950/08/11
400	Berita Propinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Oktober 1950 tentang publikasi Undang-undang Pemilihan No. 7 Tahun 1950 yaitu mengenai pemiliha anngota DPRD Propinsi dan daerah-daerah di dalam lingkungannya.	Salinan	1 lembar	1950/10/24